

Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Batu Bangka Sebelum dan Sesudah Pergub NTB No. 32 Tahun 2018

[Socioeconomic Conditions of Batu Bangka Fishermen Before and After NTB Governor Regulation No. 32 of 2018]

Lora Santika¹, Asmayadi Asmayadi¹, Muhammad Haikal Abdurachman²

¹Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B)
Jl. Semanggi No. 11 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat

²Program Studi Ilmu Perikanan, Universitas Teknologi Sumbawa
Jl. Raya Olat Maras Batu Alang, Pernek, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Diterima: 20 Desember 2024

Abstrak

Peraturan Gubernur (Pergub) NTB No. 32 Tahun 2018 menetapkan rencana aksi pengelolaan perikanan kerapu dan kakap di kawasan Teluk Saleh, meliputi pengaturan ukuran tangkapan dan alat tangkap yang diperbolehkan. Desa Batu Bangka, sebagai bagian dari Teluk Saleh, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kondisi sosial ekonomi nelayan sebelum dan sesudah implementasi Pergub tersebut, dengan fokus pada tingkat kesejahteraan, pengetahuan masyarakat terhadap peraturan, dan dampaknya terhadap praktik perikanan. Penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan nonprobability sampling dan melibatkan 75 responden dari empat dusun. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan Batu Bangka umumnya berpendidikan rendah (setingkat Sekolah Dasar) dan tergolong nelayan kecil dengan kapal <10 GT. Tingkat pengetahuan masyarakat terkait aturan lokasi penangkapan, alat tangkap yang dilarang, dan spesies yang dilindungi mengalami peningkatan, namun pemahaman mengenai aturan spesifik kerapu dan kakap masih rendah. Kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator Core Welfare Indicator (CWI) berada pada kategori sedang dengan nilai 39,4%. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Pergub No. 32 Tahun 2018 memerlukan penguatan sosialisasi agar dampaknya lebih optimal.

Kata kunci: Core Welfare Indikator; kebijakan; kesejahteraan; perikanan

Abstract

The Governor Regulation (Pergub) of West Nusa Tenggara (NTB) No. 32 of 2018 establishes action plans for managing grouper and snapper fisheries in the Teluk Saleh area, including regulations on catch sizes and permissible fishing gear. Batu Bangka Village, as part of Teluk Saleh, has a majority of its population engaged in fishing activities. This study aims to analyze changes in the socioeconomic conditions of fishermen before and after the implementation of the regulation, focusing on their welfare levels, community knowledge of the policy, and its impact on fishing practices. The study employed a survey method using a non-probability sampling approach involving 75 respondents from four hamlets. Secondary data were obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the village government. The findings revealed that Batu Bangka fishermen generally have low educational attainment (elementary school level) and are categorized as small-scale fishermen with vessels of <10 GT. The community's knowledge of regulations regarding fishing locations, prohibited fishing gear, and protected species has improved, although awareness of specific grouper and snapper regulations remains low. Community welfare, based on the Core Welfare Indicator (CWI), is in the moderate category with a score of 39.4%. These findings suggest that the implementation of Pergub No. 32 of 2018 requires enhanced socialization efforts to optimize its impact.

Keywords : Core Welfare Indikator; policy, welfare, fisheries

Penulis Korespondensi

Lora Santika | lorasantika97@gmail.com

PENDAHULUAN

Teluk saleh secara geografis berada pada wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu (Kusumawati, Susilo, dan Agus 2019). Perairan teluk saleh masuk dalam kategori semi tertutup yang berhadapan langsung dengan Laut Flores (Yulius et al. 2017). Menurut Edrus dan Suprpto (2013), Teluk Saleh memiliki potensi perikanan yang didominasi oleh pelagis kecil dan beberapa family ikan ekonomis tinggi seperti Kerapu dan Kakap yang menjadi target penangkapan nelayan. Total tangkapan ikan Kerapu di Teluk Saleh setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, bersamaan tingginya permintaan pasar ekspor (Darmawan et al. 2022). Berdasarkan data Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan NTB pada tahun 2020, menunjukkan bahwa data *Catch Per Unit Effort* (CPUE) Kerapu adalah 2,44 kg/trip masih lebih kecil dibandingkan ikan kakap 4,51 kg/trip. Peningkatan produksi perikanan akibat aktivitas penangkapan yang begitu masif, dengan keberagaman alat tangkap ikan dapat mengancam status perikanan Teluk Saleh di

kemudian hari (Edrus dan Suprpto 2013).

Teluk Saleh lebih dikenal sebagai wilayah penangkapan kerapu dan kakap oleh nelayan umumnya didominasi oleh nelayan dari Pulau Liang, Pulau Ngali dan Desa Batu Bangka (Agustina et al. 2018). Berdasarkan SK Gubernur NTB No. 523/2016, telah mengatur zonasi pemanfaatan termasuk diantaranya wilayah operasional penangkapan nelayan, khususnya di Teluk Saleh. Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2018 bertujuan untuk melakukan pengendalian penangkapan kerapu dan kakap pada beberapa aspek: (1) ukuran tangkapan, (2) perdagangan ikan, (3) alat tangkap, dan (4) waktu tangkap.

Setiap peraturan memiliki dampak terhadap nelayan yang terlibat, hal ini berkaitan dengan operasional penangkapan dan keuntungan ekonomi yang diperoleh (Ayers, Hospital, dan Boggs 2018) (Adam 2017). Kehidupan masyarakat pesisir umumnya memiliki beberapa isu pokok diantaranya: (1) kemiskinan dan kesenjangan sosial, (2) keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, (3) kualitas SDM yang rendah, (4) degradasi sumber daya

lingkungan, dan (5) kebijakan pembangunan yang belum memihak secara optimal pada masyarakat nelayan (Maldini dan Tjahjono 2012). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi sosial ekonomi nelayan khususnya di Desa Batu Bangka sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Gubernur No 32 Tahun 2018.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan sebelum dan setelah terbitnya Peraturan Gubernur No 32 Tahun 2018 yakni pada tahun 2016 dan 2022. Lokasi pengambilan data dilakukan di Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data administrasi kecamatan, Desa Batu Bangka terdiri dari: (1) Dusun Batu Bangka A, (2) Dusun Batu Bangka B, (3) Dusun Sengkal dan (4) Dusun Prajak. Terdapat 697 KK, dengan total populasi 2.403 jiwa yang terdiri dari 1.227 laki-laki dan 1.276 perempuan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode survei lapangan melalui wawancara menggunakan kuesioner sosial-ekonomi.

Sumber Data

Data Primer

Data yang diperoleh dari observasi lapangan atau survei lapangan melalui

wawancara dengan kuesioner. Terdapat 75 orang responden nelayan yang tinggal menetap di Desa Batu Bangka dengan pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak (Non Probability Sampling) (Sugiyono 2015).

Data Sekunder

Data sekunder berupa data kependudukan, demografi desa diperoleh melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah setempat.

Metode Analisis Data

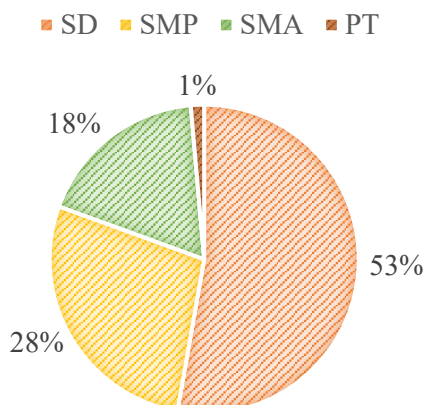
Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil responden terkait Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2018 kemudian diklasterisasi dengan nilai *Core Welfare Indicator* (CWI) (Tabel 1) pada aspek kesejahteraan nelayan yang dilihat dari beberapa aspek di antaranya:

- 1) Tingkat pendidikan kepala rumah tangga
- 2) Proporsi jumlah anggota keluarga yang bekerja
- 3) Memiliki lantai rumah yang memadai
- 4) Memiliki dinding rumah yang memadai
- 5) Memiliki akses ke sanitasi yang memadai
- 6) Penerangan Utama
- 7) Kepemilikan aset

Klasterisasi CWI akan disesuaikan dengan data yang diperoleh, dengan mengamati pengamatan semua indikator dari responden. Terkait dengan jumlah

Tabel 1. Kriteria Dampak Perubahan Sosial Ekonomi Sebelum dan Sesudah PERGUB 32/2018 pada Desa Batu Bangka, NTB.

Kriteria	Nilai CWI
Tinggi	66 - 98
Sedang	33 – 65
Rendah	0 – 32



Gambar 1. Persentase Tingkat Pendidikan Formal Responden Nelayan Batu Bangka

sampel yang diamati tentunya mengacu pada jumlah populasi berdasarkan data BPS, dengan jumlah responden adalah 30-500 (Sugiyono 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Sosial Rumah Tangga Desa Batu Bangka

Gambar 1 menunjukkan tingkat pendidikan formal nelayan. Sebanyak 53% nelayan berpendidikan SD, 28% berpendidikan SMP, 18% berpendidikan SMA, dan 1% berpendidikan PT.

Alat Tangkap yang Digunakan

Data penggunaan alat tangkap ikan nelayan desa Batu Bangka adalah 51% panah, 30% pancing ulur, 9% jaring insang hanyut, 7% bagan berperahu dan 2% jaring insang lingkaran. Khusus kategori

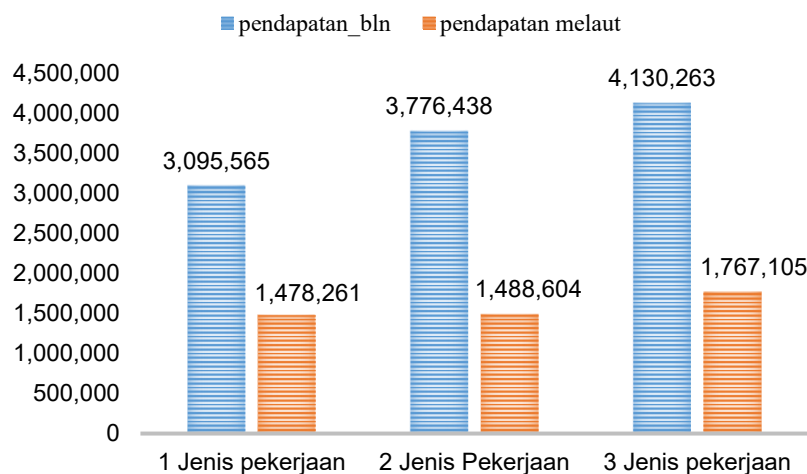
alat tangkap panah diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni, nelayan dengan mesin kapal dalam dan mesin luar/ketinting. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Anak Buah Kapal (ABK), waktu penangkapan/trip dan biaya operasional. Informasi lainnya adalah nelayan dengan perahu 1 GT memiliki beberapa alat tangkap yang dapat dioperasikan seperti pancing ulur, jaring insang hanyut, dan jaring insang lingkaran. Berikut beberapa alat tangkap Bagan perahu yang menggunakan mesin dengan 1 – 3 GT.

Pendapatan Rumah Tangga

Gambar 2, memperlihatkan bahwa tingkat pendapatan nelayan dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pekerjaan yang ditekuni setiap harinya. Profesi nelayan

Tabel 2. Jenis dan Operasional Alat Tangkap Nelayan Batu Bangka

Alat Tangkap	Biaya Operasional	Trip	Nilai Tangkap (Rp)
Bagan Perahu	450.000	1	3.466.667
Jaring Insang Hanyut	72.500	1	148.875
Jaring Insang Lingkar	100.000	1	350.000
Panah	427.727	1	1.683.500
Pancing Ulur	84.615	1	167.865
Grand Total	284.884	1	1.175.924



Gambar 2. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Desa Batu Bangka Setiap Bulan

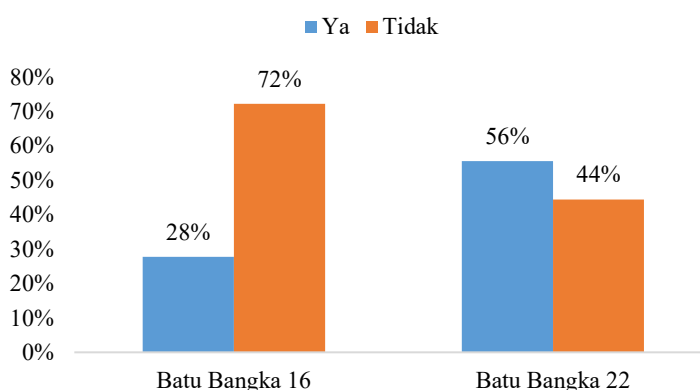
dari melaut umumnya berkisar antara Rp. 1.478.261 – Rp. 1.767.105. Di luar itu, nelayan dengan profesi lainnya hingga 3 jenis pekerjaan dapat memperoleh pendapat bulanan hingga Rp. 4.130.263.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Batu Bangka Sebelum dan Sesudah Peraturan Gubernur 32 Tahun 2018

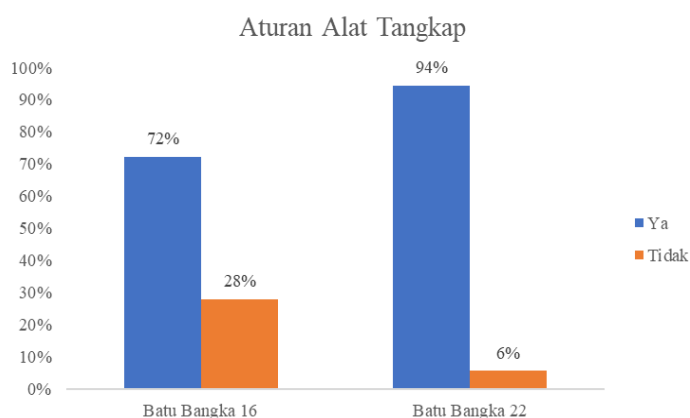
Pemahaman Aturan Zonasi

Informasi sistem zonasi dalam Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2018 dan terkait kawasan konservasi Pulau Liang dan Pulau Ngali. diketahui melalui upaya pemahaman nelayan yang dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan tingkat pemahaman nelayan Desa Batu Bangka berdasarkan periode waktu yang berbeda. Hingga tahun 2022, sebanyak 56% responden nelayan mengetahui adanya aturan zonasi di sekitar kawasan konservasi Pulau Liang dan Pulau Ngali. Sisanya sebanyak 44% responden nelayan menjawab tidak mengetahui terkait aturan zonasi tersebut.



Gambar 3. Pemahaman Nelayan Desa Batu Bangka Terkait Aturan Zonasi Penangkapan pada Tahun 2016 dan 2022



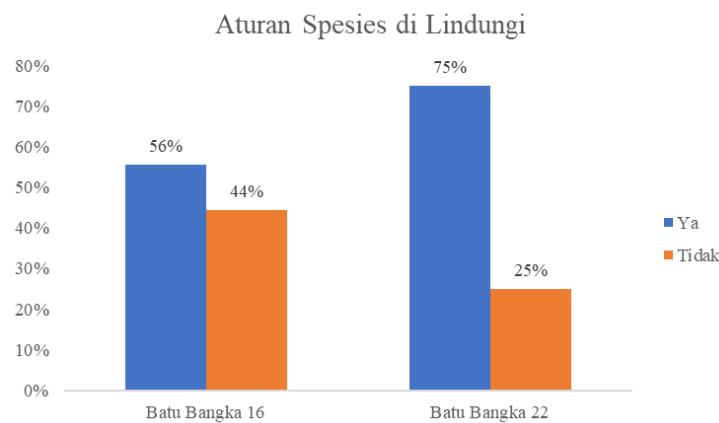
Gambar 4. Pemahaman Nelayan Desa Batu Bangka Terkait Aturan Alat Tangkap yang Diperbolehkan pada Tahun 2016 dan 2022

Aturan Alat Tangkap

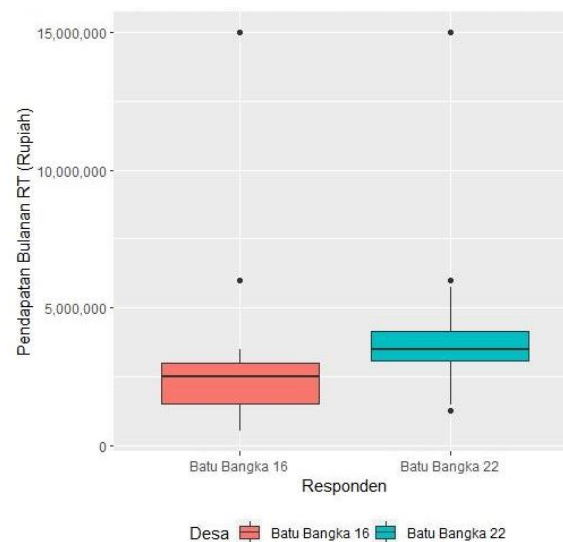
Gambar 4 menunjukkan tingkat pemahaman nelayan Desa Batu Bangka terhadap aturan alat tangkap pada periode waktu yang berbeda. Hingga tahun 2022, sebanyak 94% responden nelayan mengetahui adanya aturan alat tangkap yang diperbolehkan dalam melakukan penangkapan. Sisanya sebanyak 6% responden nelayan menjawab tidak mengetahui terkait aturan alat tangkap yang diperbolehkan.

Aturan Spesies yang Diatur dalam Pergub No. 32 Tahun 2018

Gambar 5, tingkat pemahaman responden terkait aturan spesies dilindungi mengalami peningkatan di tahun 2022. Sebanyak 75% nelayan Batu Bangka mengetahui terkait aturan spesies dilindungi secara umum. Namun Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2018 dengan jenis Kerapu dan Kakap masih rendah.



Gambar 5. Pemahaman Nelayan Desa Batu Bangka Terkait Aturan Spesies yang dilindungi pada Tahun 2016 dan 2022



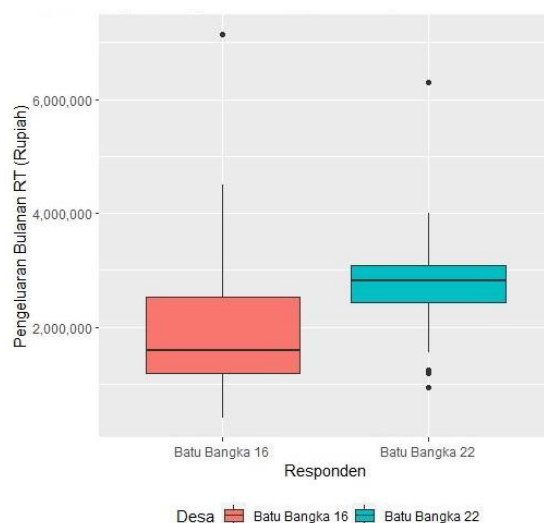
Gambar 6. Total Pendapatan Nelayan Desa Batu Bangka Di Tahun 2016 dan 2022

Pendapatan

Gambar 6 menunjukkan pendapatan Nelayan desa Batu Bangka dengan kisaran Rp. 500.000 – Rp. 15.000.000. Nilai ini mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi berkisar Rp. 3.824.888. Bila dibandingkan di tahun 2016 sebesar Rp. 3.677.000.

Pengeluaran

Gambar 7 adalah pengeluaran nelayan Desa Batu Bangka berkisar pada Rp. 400.000 – Rp. 7.140.000. Nilai pengeluaran di tahun 2022 adalah Rp. 2.722.916. Informasi lain menunjukkan, sebanyak 44% nelayan Desa Batu Bangka memiliki pengeluaran di bawah rata-rata di tahun 2022.



Gambar 7. Total Pengeluaran Nelayan Desa Batu Bangka Di Tahun 2016 dan 2022

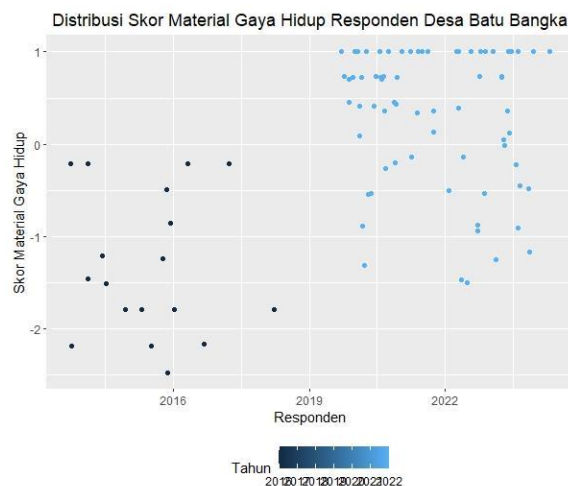
Tabel 3. Skor Material Aset Nelayan Desa Batu Bangka

No	Aset	PCI
1	Kipas angin	0,70
2	Air keran dalam rumah	0,61
3	Kulkas	0,64
4	Televisi	0,61
5	Parabola	0,71
6	Minyak tanah	-0,61
7	Kompas gas	0,71
8	Atap lainnya	0,61
9	Dinding semen	0,64
10	Lantai kayu	-0,59
11	Motor	0,62
SS loadings		4,55
Proportion Var		0,41

Analisis Kesejahteraan Nelayan

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kepemilikan aset nelayan berada pada proporsi varian 0.41 atau berada pada korelasi cukup. Tabel 4 menunjukkan nilai CWI pada tahun yang berbeda. Terdapat 6 indikator penilaian dengan rata-rata skor yang mengalami peningkatan di 2022 menjadi 15,6, bila dibandingkan dengan tahun 2016

sebesar 12,1. Peningkatan paling tinggi berada pada indikator no (4) memiliki dinding rumah yang memadai menjadi 5,5. Sedangkan indikator no (6) penerangan utama dan (7) kepemilikan aset tidak mengalami peningkatan sama sekali.



Gambar 8. Persebaran Skor MGH Nelayan Desa Prajak

Tabel 4. Perhitungan CWI Nelayan Desa Batu Bangka pada Tahun 2016 dan 2022

No	Indikator	Rata-Rata	
1	Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga	2,5	2,7
2	Proporsi jumlah anggota keluarga yang bekerja	1,0	2,3
3	Memiliki Lantai rumah yang memadai	2,6	2,8
4	Memiliki dinding rumah yang memadai	4,0	5,5
5	Memiliki akses ke sanitasi yang memadai	0,5	0,9
6	Penerangan Utama	1,0	1,0
7	Kepemilikan aset	0,5	0,5
Total		12,1	15,6

Pembahasan

Karakteristik Sosial Rumah Tangga Desa Batu Bangka

Terdapat tiga klaster umur nelayan di Desa Batu Bangka yakni 20-30 tahun, 30-40 tahun dan 40–50 tahun. Sebagian besar nelayan berusia 30 tahun, dengan rentang usia adalah 19–60 tahun. Menurut BPS (2015), rentang umum optimal untuk profesi nelayan berada pada kisaran 20-50 tahun. Selain dinilai memiliki kondisi fisik yang lebih prima, nelayan juga diperkirakan memiliki kemampuan berfikir yang baik pada rentang usia tersebut.

Sebagian besar nelayan di Desa Batu Bangka didominasi oleh Suku Samawa (Sumbawa), Bugis, Mandar, Bajo, Mbojo (Bima) dan Sasak (Lombok). Sebanyak 78% adalah suku Samawa, sedangkan suku minoritas seperti Sulawesi (Bugis dan Mandar) dan Suku Bajo adalah 14%. Terdapat suku lain seperti Mbojo (Bima) dan Sasak (Lombok) yang tidak berprofesi sebagai nelayan. Menurut Fortuna, Rahmalia, dan Hikam (2023) suku Samawa adalah suku lokal yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Besar. Beberapa tempat di Kabupaten Sumbawa Besar seperti

Pulau Bungin, Pulau Kaung dan Pulau Medang didominasi oleh suku bajo yang mayoritasnya memiliki profesi sebagai nelayan (Utari, Fanani, dan Yunastiawan 2024).

Gambar 1 menunjukkan bahwa mayoritas nelayan di Desa Batu Bangka, yaitu sekitar 53%, memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Selain itu, dari kelompok nelayan yang berada dalam rentang usia produktif 20-30 tahun, sekitar 40% diantaranya juga hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SD. Kondisi ini berkaitan erat dengan keterbatasan fasilitas pendidikan di desa tersebut, dimana saat ini hanya tersedia jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD). Sementara itu, untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun Perguruan Tinggi (PT), penduduk harus mengakses fasilitas pendidikan yang berada di luar kecamatan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Batu Bangka meliputi keterbatasan akses, kondisi ekonomi yang kurang mendukung, serta rendahnya motivasi dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Hasbullah (2022), nelayan adalah profesi dengan tingkat pendidikan

yang rendah dan diikuti dengan penghasilan yang rendah. Serupa dengan penelitian Mulyani, Asri, dan Dwiyantri (2023), daerah Tanjung Luar NTB, nelayan memiliki dengan tingkat pendidikan SD adalah 50%, dan sekitar 48,9% berada pada usia 21-30 tahun.

Sebagian besar nelayan di Desa Batu Bangka memiliki anggota keluarga sebanyak 304 orang, sehingga tergolong dalam kategori rumah tangga kecil. Klasifikasi ini sesuai dengan ketentuan BPS yang mendefinisikan rumah tangga kecil sebagai keluarga dengan 3-4 anggota. Nelayan di Desa Batu Bangka mampu mengoperasikan berbagai jenis alat tangkap ikan, dengan biaya operasional terendah sebesar Rp. 72.500. Sementara itu, biaya operasional tertinggi ditemukan pada penggunaan alat tangkap berukuran besar, yaitu bagan ikan pelagis, yang mencapai Rp. 450.000. sebagian besar pengeluaran operasional ini dialokasikan untuk pembelian bahan bakar serta kebutuhan konsumtif nelayan.

Secara ekonomi berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa nelayan memiliki penghasilan yang rendah. Sehingga beberapa nelayan memiliki mata pencaharian lainnya seperti petani, pekerjaan informal karyawan dan lain-lain. Adanya alternatif mata pencaharian ini berkontribusi untuk mendapatkan ekonomi lainnya. Menurut Husni (2002),

nelayan skala kecil menjadi salah satu profesi dengan tingkat penghasilan yang rendah. Kondisi ini memicu nelayan untuk mencari alternatif mata pencaharian tambahan untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi. Rendahnya keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh nelayan secara garis besar dapat dipengaruhi oleh faktor iklim yang sulit untuk diprediksi dan mempengaruhi hasil tangkapan, sehingga biaya produksi tidak dapat terpenuhi.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Batu Bangka Sesudah dan Sebelum Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2018

Pemahaman Masyarakat

Dalam pasal 6 menyebutkan pengendalian penangkapan ikan kerapu dan kakap di Teluk Saleh didasarkan atas beberapa aspek, diantaranya ukuran tangkapan, perdagangan ikan, alat tangkap, dan waktu penangkapan. Tingkat pemahaman masyarakat terkait hal tersebut dikaji dalam beberapa aspek pemahaman terkait aturan-aturan yang diketahui oleh masyarakat seperti aturan lokasi penangkapan ikan, aturan alat tangkap dilarang, dan jenis ikan yang diatur.

Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2018 dan penetapan Kawasan Konservasi Pulau Liang dan Pulau Ngali berdasarkan SK Gubernur NTB No. 523. Tahun 2016 secara garis besar bertujuan

untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan perikanan bagi masyarakat lokal. Terkait hal tersebut, berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan telah memahami terkait kawasan konservasi dan upaya pengelolaan perikanan secara umum. Menurut Santika, Asmayadi, dan Rafandi (2024) tingkat pendidikan dan upaya pendampingan stakeholder menjadi sangat penting bagi peningkatan persepsi nelayan terhadap kawasan konservasi. Hal ini juga dapat mendukung upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan bagi nelayan melalui pemberian pemahaman yang baik terhadap dampak sistem zonasi dalam kawasan konservasi.

Mengacu pada Pasal 6 dalam Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2018, kegiatan penangkapan ikan menggunakan jaring insang (*gillnet*), khususnya untuk ikan kerapu dan kakap, harus menggunakan mata jaring dengan ukuran minimal 4 inci. Sementara itu, alat tangkap pancing harus mampu menangkap ikan dengan berat setidaknya 500 gram. Terkait hal itu melalui Gambar 4 diketahui bahwa sekitar 94% responden nelayan mengetahui terkait alat tangkap yang diperbolehkan untuk menangkap ikan. Namun, informasi lanjutnya pada Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2018 terkait ukuran mata jaring dan mata pancing belum banyak diketahui. Hal ini

menandakan bahwa masih perlunya pendampingan dan sosialisasi terhadap nelayan terkait dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah lokal. Upaya pendamping terhadap nelayan tidak hanya dilakukan dengan menginformasikan peraturan yang ada (Santika et al. 2024). Namun, pendamping terhadap pendapatan ekonomi dapat dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan perikanan rumahan.

Kondisi Ekonomi Masyarakat

Perekonomian nelayan Desa Batu Bangka umumnya tidak terlepas dari beberapa faktor seperti musim penangkapan, kepemilikan modal, manajemen usaha perikanan dan pola konsumtif masyarakat. Nelayan Desa Batu Bangka memiliki pendapatan yang cenderung stabil, namun terkait dengan pengeluaran hal ini cenderung berbeda pada beberapa individu nelayan. Hal ini dipengaruhi karena adanya kebutuhan yang berbeda. Umumnya nelayan di Desa Batu Bangka di Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 738.777 yang dapat dilihat pada Gambar 6. Sedangkan pengeluaran nelayan juga mengalami peningkatan (Gambar 7), hal ini dipengaruhi oleh faktor harga bahan pokok yang mungkin terjadi bukan secara lokal melainkan juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Jika dilihat pada tingkat pendapatan dan pengeluaran perbulan

nelayan, umumnya pendapatan nelayan di Desa Batu Bangka pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 738.777. Sedangkan pendapatan nelayan pada tahun 2016 dan 2022 dapat dilihat pada Gambar 6 Sejalan dengan peningkatan pendapatan nelayan Desa Batu Bangka, pengeluaran juga mengalami peningkatan. Hal tersebut dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kenaikan berbagai bahan pokok. Sedangkan rata-rata pengeluaran nelayan Desa Batu Bangka dapat dilihat pada Gambar 7. (Husni 2002), mengungkapkan bahwa harga jual komoditi perikanan sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar lokal dan nasional. Menurut Santika, Asmayadi, dan Rafandi (2024) pengeluaran rumah tangga nelayan sebagian besar dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan pokok, dan beberapa juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perabotan rumah.

Analisis tingkat kesejahteraan nelayan juga dapat dianalisis dengan melihat kepemilikan aset yang dapat dilihat dari kondisi rumah. Kepemilikan aset biasanya tidak menjadi fokus utama dalam masyarakat nelayan (Husni 2002). Hal ini biasanya disesuaikan untuk pemenuhan kebutuhan pokok nelayan. Berdasarkan skor MGH yang dianalisis dengan *Principal Component Analysis* (PCA). Tabel 3 menjelaskan bahwa kepemilikan aset material nelayan mulai

meningkat yang diduga menjadi indikator peningkatan gaya hidup di masyarakat nelayan. Berdasarkan Tabel 4, tingkat kesejahteraan nelayan dijabarkan dalam tiga kelas yakni,

- a) Kesejahteraan rendah, dengan indeks $<33,33$
- b) Kesejahteraan sedang, dengan indeks $33,34 - 66,66$
- c) Kesejahteraan tinggi, dengan indeks $> 66,67$

Berdasarkan total skor CWI yang diperoleh pada tahun 2022 yaitu 15,6, hasil ini menunjukkan adanya peningkatan. Hasil perhitungan tersebut mengindikasikan adanya perbedaan nilai, dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar 30,6%, sementara pada tahun 2022 meningkat menjadi 39,4%. Pada tahun 2016 masuk dalam kategori kesejahteraan rendah sedangkan pada tahun 2022 masuk ke dalam kesejahteraan sedang, yang secara umum menunjukkan adanya peningkatan Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Batu Bangka pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2016.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah dengan adanya Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2018:

- 1) Penegakkan dan penerapan Peraturan Gubernur No. 32 Tahun

2018 tidak berjalan secara optimal karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi yang diperoleh oleh nelayan Desa Batu Bangka.

- 2) Terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 738.777 masih lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran sebesar Rp. 126.150 pada nelayan desa batu bangka di tahun 2022 yang secara umum tidak dipengaruhi oleh Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2018, melainkan karena faktor ekonomi nasional yang memang mengalami peningkatan.
- 3) Terjadi peningkatan kesejahteraan sebesar 3,94% di tahun 2022, sebagai dampak peningkatan pendapatan nelayan Desa Batu Bangka.
- 4) Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu ditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat nelayan terkait peraturan gubernur yang mengatur tentang kawasan konservasi.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemberi dukungan finansial terhadap penelitian ini, masyarakat yang terlibat dan ucapan terimakasih kepada semua penulis yang terlibat dalam penyusunan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Lukman. 2017. "Kebijakan Pelarangan Penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning: Analisis Dampak dan Solusinya." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 2 7(2):215–27.
- Agustina, Siska, Anthony Sisco, Panggabean Muhammad, Natsir Jimmi, Heidi Retnoningtyas, dan Irfan Yulianto. 2018. *Kondisi Stok Perikanan Kerpu dan Kakap di Perairan Teluk Cempì, Teluk Waorada, dan Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Wildlife Conservation Society.
- Ayers, Adam L., Justin Hospital, dan Christofer Boggs. 2018. "Bigeye tuna catch limits lead to differential impacts for Hawaii longliners." *Marine Policy* 94:93–105.
- BPS. 2015. *Analisis Kesejahteraan Rumah Tangga Usaha Perikanan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Darmawan, Regi, Budy Wiryawan, Sonja Kleinertz, Ari Purbayanto, dan Irfan Yulianto. 2022. "Pemetaan Spasial Dan Temporal Status Pemanfaatan Ikan Kerapu Di Perairan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat." *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management* 13(2):195–205. doi: 10.29244/jmf.v13i2.41239.
- Edrus, Isa Nagib, dan Suprpto. 2013. "Arah Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap Di Sekitar Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 5(1):25–38. doi: 10.15578/jkpi.5.1.2013.25-38.
- Fortuna, C. A., F. Rahmalia, dan A. Z. Hikam. 2023. "Perkembangan Konflik Sosial Suku Samawa dan Suku Bali di Sumbawa Besar Pada Tahun 1980-2013." *Daya Nasional Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 1(4):146–54.
- Hasbullah. 2022. "Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi NTB Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Pembudidaya Ikan Di Sekotong)." *Al Madani* 1(1):74–96. doi: 10.37216/al-madani.v1i1.730.
- Husni, Syarif. 2002. "Tingkat Produktivitas Kerja Nelayan Skala Kecil Di Wilayah Pesisir Lombok Barat ." *Journal Agrimansion* 11(02):209–20.
- Kusumawati, Erni, Setyo Budi Susilo, dan Syamsul Bahri Agus. 2019. "Analisis Penentuan Sebaran Konsentrasi Klorofil-A dan Produktivitas Primer di Perairan Teluk Saleh menggunakan Citra Satelit Landsat OLI 8." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan*

- Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)* 9(3):671–79. doi: 10.29244/jpsl.9.3.671-679.
- Maldini, Fandi Yusuf, dan Heri Tjahjono. 2012. “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, dan Sosial Ekonomi Nelayan Terhadap Ketuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara.” *Edu Geography Journal* 1(27–32).
- Mulyani, Laily Fitriani, Yuliana Asri, dan Septiana Dwiyantri. 2023. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan Desa Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur.” *Pengabdian Perikanan Indonesia* 3(1):200–208.
- Santika, Lora, Asmayadi, dan Tezar Rafandi. 2024. “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Terhadap Pemahaman Aturan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Sekitar Kawasan Konservasi Pulau Panjang.” *Jurnal Ilmu Kelautan Lesser Sunda* 4(1):21–30. doi: 10.29303/jikls.v4i1.107.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Utari, Anggi, Fahril Fanani, dan A. Eka P. Yunastiawan. 2024. “Karakteristik Lingkungan Permukiman Pesisir Suku Bajo di Pulau Bungin dan Pulau Kaung NTB.” *Matra* 5(1):75–85.
- Yulius, Yulius, Aida Heriati, Eva Mustikasari, dan Ranela Intan Zahara. 2017. “Karakteristik Pasang Surut Dan Gelombang Di Perairan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Segara* 13(1):65–73. doi: 10.15578/segara.v13i1.6423.